



► BANTUAN SOSIAL

# Penggunaan Dana PKH Diawasi Ketat

WONOSARI—Bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) tahap kedua di Gunungkidul sudah mulai dicairkan sejak 14 Juni 2025 lalu. Diharapkan bantuan itu dipergunakan dengan bijak sesuai dengan peruntukannya masing-masing.

David Kurniawan  
 david@harianjogja.com

Sekretaris Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos-P3A) Gunungkidul, Nurudin Araniri mengatakan bantuan PKH dicairkan setiap tiga bulan sekali. Hingga pertengahan Juni ini sudah ada dua kali pencairan.

Tahap pertama untuk Januari-Maret sudah dicairkan dengan total penerima sebanyak 51.260 kepala keluarga dan total nominal yang disalurkan mencapai Rp25 miliar. Sementara pencairan tahap kedua untuk April-Juni juga sudah dicairkan mulai 14 Juni 2025. "Prosesnya langsung ditransfer ke rekening masing-masing penerima manfaat. Untuk data penerima tahap kedua, masih kami kumpulkan, tapi yang jelas bantuan sudah dicairkan," kata

## INDEKS BANSOS PKH



☑ Ibu hamil	: Rp750.000*
☑ Anak usia dini	: Rp750.000
☑ Satu anak SD	: Rp225.000
☑ Satu anak SMP	: Rp375.000
☑ Satu anak SMA	: Rp500.000
☑ Lansia	: Rp600.000
☑ Anak difabel	: Rp600.000

\*sekali pencairan | Sumber: Dinsos-P3A Gunungkidul (idak)

► PKH tahap pertama (Januari-Maret) sudah dicairkan kepada 51.260 keluarga dengan total nominal Rp25 miliar.

► Kalau terbukti ada penyelewengan penggunaan uang PKH, maka bisa diusulkan untuk diberhentikan sebagai penerima bantuan.

Nurudin, Rabu (18/6).

Dia mengakui, data yang diterima baru sebatas penerima manfaat di tahap pertama, sementara untuk data tahap kedua masih dalam penghitungan. Total PKH yang disalurkan di termin pertama mencapai Rp25 miliar

Menurut Nurudin, besaran bantuan yang diberikan dalam

setiap keluarga tidak sama. Hal ini tak lepas ada beberapa indikator untuk menentukan besaran yang diterima. "Besaran bantuan ini diberikan setiap tiga bulan sekali. Kalau di dalam keluarga ada ibu hamil, anak bersekolah dan lansia, maka jumlah bantuan akan lebih banyak," katanya.

Nurudin berharap para penerima manfaat bisa menggunakan bantuan dengan bijak dan sesuai dengan peruntukannya.

### Pengawasan Ketat

Untuk itu, dia mengingatkan agar bantuan tidak dipakai untuk kebutuhan konsumtif yang bukan merupakan kebutuhan pokok. "Tentu ada pengawasan dari pendamping PKH. Kalau terbukti ada penyelewengan, maka bisa diusulkan untuk diberhentikan sebagai penerima bantuan," katanya.

Koordinator PKH Gunungkidul, Herjun Pangaribowo mengatakan dalam setahun ada empat kali pencairan PKH. Hingga sekarang sudah dicairkan untuk bantuan tahap kedua. "Untuk tahap kedua datanya masih dalam proses rekap di aplikasi SIKS-NG. Yang jelas, kami terus melakukan pendampingan untuk memastikan bantuan bisa tepat sasaran," katanya.